

AKSES, KONTROL, MANFAAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN (PUMP) PERSPEKTIF GENDER

ACCESS, CONTROL, BENEFIT AND PARTISIPATION THROUGH BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM OF MINA RURAL AREA (BDPMRA) GENDER PERSPECTIVE

Oktiva Anggraini, Sunarru Samsi Hariadi, Partini, Mudiyono

Department of Extension and Development Communication, School Gadjah Mada University Teknika Utara,
Pogung, Yogyakarta, 55281

E-mail: oktivabiyan@yahoo.co.id; oktivabiyan@gmail.com.

Naskah diterima 29 November 2016, direvisi 10 Desember 2016, disetujui 27 Desember 2016

Abstract

The study aimed to review on access, control and networking strengthening of the Joint of Business Group (KUB) fishermen and fisherwomen in managing fisheries resources through Business Development Program of Mina Rural Area (BDPMRA). Descriptive-qualitative approach is applied. Data collection is done through FGD, observations and in-depth interviews to explore deeply the existing problems. The results showed the weaknesses of gender disaggregated data and monitoring system, lack of data based on the needs assessment, and no government affirmation lead to the lower level of women participation in access and control over BDPMRA program. In addition, the program still marginalizes vulnerable groups of the coastal communities. Nevertheless, the participation of the groups was symbolic at the beginning, it develops into advanced category under the assistance of the instructors or trainers, and finally it can be categorized into self-help groups. Networking strengthening through BDPMRA still proceed to develop groups of fishermen and fisher women become independent. Optimizing program measured only by administrative values will result in no change in the position and status of fisherwomen. They are still vulnerable to be subordinated and marginalized community groups. The networking self-group of fisherwomen and local entrepreneurs should be strengthened through the establishment of joint venture group that can be used as a learning medium to produce marketable commodities.

Key words: Empowerment, Fisherwomen, Access, Control, Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji akses dan kontrol serta perluasan jaringan kelompok usaha nelayan dan perempuan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD, observasi dan wawancara mendalam guna mengeksplorasi permasalahan yang ada secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan, tidak adanya data gender terpilah, sistem pemantauan lemah, minimnya data berdasar penilaian kebutuhan, kurangnya afirmasi pemerintah berdampak pada rendahnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan atas program PUMP. Selain itu, program ini masih meminggirkan beberapa kelompok masyarakat pesisir. Namun demikian, partisipasi kelompok yang semula simbolis, dapat berkembang di bawah arahan penyuluh, yang nantinya menjadi kelompok swadaya. Perluasan jaringan usaha melalui PUMP masih berproses untuk mengantarkan kelompok nelayan dan wanita nelayan menjadi mandiri. Optimalisasi program yang hanya diukur secara administrasi, hanya akan mengakibatkan tidak ada perubahan dalam posisi dan status nelayan. Mereka yang rentan, ter subordinasi dan

menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Jaringan kelompok perempuan nelayan dan pengusaha lokal harus diperkuat melalui pembentukan kelompok usaha bersama yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menghasilkan komoditas berharga.

Kata kunci: Akses, Kontrol Dan Partisipasi, Pemberdayaan, Perempuan Nelayan.

A. PENDAHULUAN

Marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan menjadi masalah global, tidak terkecuali di sektor perikanan dan kelautan. Terutama ketika analisis gender dalam komunitas perikanan tidak sekedar membicarakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan, namun juga menyentuh persoalan pengambilan keputusan dalam proses dan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Kegiatan perempuan nelayan dari prapanen hingga pascapanen tidak diragukan lagi, meskipun acapkali tidak terekam oleh data statistik secara benar. Hal tersebut pada gilirannya, memunculkan kebijakan pemerintah yang lebih menitikberatkan perhatian pada sektor penangkapan ikan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan (Bennet, 2005). Ketidaksetaraan gender dalam akses ke sumber daya perikanan, tidak hanya mempengaruhi mata pencaharian perempuan nelayan, namun berdampak pada pendidikan, kebutuhan gizi, dan kesehatan anggota keluarga. (Weeratunge et al. 2010).

Data FAO 2012 menunjukkan, bahwa lebih dari 45 juta penduduk dunia bergerak di sektor perikanan dan kelautan baik sebagai pekerja tetap maupun sambilan. Dari 86 negara, 5,4 juta perempuan bekerja di sektor kelautan dan perikanan, bahkan di Cina dan India, jumlah perempuan nelayan mencapai 24 persen lebih dari 60 persen hasil perikanan dipasarkan oleh perempuan nelayan (FAO, 2012). Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014 menunjukkan bahwa, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan adalah yang terbesar 12,5 juta orang. Sungguhpun perempuan nelayan memiliki andil yang cukup besar, untuk mewujudkan kesetaraan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan menjadi rantai produksi yang bernilai bagi nelayan dan perempuan nelayan, tidaklah mudah.

Berbagai program pengarusutamaan gender dan pengurangan kemiskinan yang selaras dengan cita-cita pembangunan global, MDG's (*Millenium Development Goals*) dilanjutkan dengan SDG's (*Sustanaibility Development Goals*), diimplementasikan di pesisir. Akan tetapi berbagai model pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya berhasil menggerakkan sistem dan usaha perikanan dan kelautan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk mempertahankan orientasi kebijakan pembangunan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa mencermati peran yang semestinya difasilitasi oleh negara dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Target yang terukur merupakan hal yang niscaya mesti dicapai sehingga kebijakan pembangunan daerah cenderung mengabaikan keseimbangan antarsektor. Pada sisi lain terdapat kecenderungan lemahnya sistem pendukung usaha perikanan dan kelautan dalam hal penciptaan akses dan kesempatan untuk penguasaan sumberdaya (Partosuwiryo, 2010). Lemahnya dukungan lingkungan kebijakan pemerintah (*policy environment*) dan belum optimalnya dukungan sektor swasta dalam pemberdayaan potensi kelembagaan dan organisasi sosial tradisi dalam pengembangan perikanan dan kelautan (Sakaria, 2014, Anggraini, 2014) akhirnya bermuara pada rendahnya akses bagi komunitas perikanan dan kelautan dalam menguasai sumber daya perikanan dan kelautan.

Secara konseptual, aspek akses dan kontrol erat dengan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif gender, pendekatan pemberdayaan lebih bertumpu pada kerangka pemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan meningkatkan kekuatan diri (*internal strength*) (Moser, 1993). Peter Hancock (2001:81) memperkuat argumen Moser, bahwa proses pemampuan diri warga akan berarti dengan

dukungan di tingkat makro, yakni dari negara dalam bentuk kebijakan pengarasutamaan gender, akses pada pasar dan modal, selain dari diri perempuan sendiri.

Partisipasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, akan positif jika masyarakat merasa memiliki suatu kekuatan. Kekuatan berasal dari kemampuan untuk mempengaruhi dan dari perasaan memiliki kapasitas untuk mencapai keberhasilan, mengetahui berbagai peluang untuk melakukan perihal yang menarik minat mereka, hal-hal yang merasa kompeten tentang keterampilan dan kemampuan mereka digunakan (Ife, 2008:316). Berkaitan dengan konteks penelitian ini, akses dan kontrol masyarakat pesisir (peluang dan penguasaan) terhadap sumberdaya dalam keluarga ataupun masyarakat pada umumnya, dapat dilihat dari profil peluang dan penguasaan baik laki-laki maupun perempuan terhadap sumberdaya dan manfaatnya. Profil peluang dan penguasaan terhadap sumberdaya ini mencakup informasi siapa yang mempunyai peluang dan penguasaan terhadap (1) sumberdaya fisik/material (Lister, 2000), seperti tanah, modal, peralatan, dan sebagainya (2) pasar komoditi (untuk membeli dan menjual barang) dan kerja (3) sumberdaya sosial budaya. Profil peluang dan penguasaan terhadap manfaat mencakup informasi siapa yang mempunyai peluang dan penguasaan atas hasil (1) pendapatan (2) kekayaan bersama (3) kebutuhan dasar: makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain (4) pendidikan (5) *prestise/political power*.

Kemandirian perempuan nelayan berkait dengan lembaga yang ada di sekitar, maka organisasi dan lembaga lokal yang diikuti akan bermakna ketika mempunyai fungsi: (a) mengorganisir dan memobilisasi sumberdaya; (b) membimbing dalam membuka akses ke sumberdaya produksi; (c) membantu meningkatkan *sustainability* pemanfaatan sumberdaya alam; (d) menyiapkan infrastruktur sosial di tingkat lokal; (e) mempengaruhi lembaga-lembaga politis; (f) membantu menjalin hubungan antara petani, penyuluh dan peneliti lapang; (g) meningkatkan akses ke sumber informasi; (h) meningkatkan *kohesi sosial*; (i)

membantu mengembangkan sikap dan tindakan kooperatif (Ostrom, 1990).

Eradikasi kemiskinan yang masih menjadi episentrum SDG's, menuntut kerja keras dari negara untuk menghadirkan program yang tepat bagi kawasan pesisir, yang sebagian besar penduduknya tergolong miskin. Program Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM-PUMP) Perikanan Tangkap, menjadi salah satu program di tanah air, untuk mengentaskan kemiskinan pesisir. Kabupaten Bantul yang menjadi lokasi penelitian ini, menjadi salah satu dari 34 provinsi sasaran. Diterapkannya Program BLM-PUMP sejak tahun 2011, bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi nelayan, dalam wadah kelembagaan yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai sasaran program, bukan individu. Kelompok Usaha Bersama merupakan wahana yang idealnya dapat mengakomodir akses pertukaran informasi pasar (jejaring ekonomi) guna meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selain itu, pertukaran teknologi ataupun penyediaan infrastruktur guna mencapai efektifitas dan efisiensi kerja serta KUB sebagai titik tolak akses terhadap permodalan. Data *pre survey* menunjukkan proses pemberdayaan ekonomi melalui PUMP belum diikuti penguatan lembaga lokal yang ada yang memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan nelayan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka:

Rumusan Masalah:

- Bagaimana akses, kontrol, manfaat dan partisipasi masyarakat pesisir terhadap PUMP perspektif gender?
- Bagaimana proses perluasan jaringan usaha kelompok nelayan dan kelompok perempuan nelayan melalui PUMP perspektif gender?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akses, kontrol, manfaat dan partisipasi masyarakat pesisir terhadap PUMP perspektif gender dan proses perluasan jaringan usaha kelompok nelayan dan kelompok perempuan nelayan melalui PUMP perspektif gender. Manfaat dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengembangkan model pemberdayaan

masyarakat pesisir sebagai salah satu jawaban pengurangan kemiskinan masyarakat pesisir dan pembangunan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berorientasi gender. Lokasi penelitian di Kabupaten Bantul dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan alasan dibanding daerah berpesisir lain penerima PUMP di provinsi DI.Yogyakarta, Kabupaten Bantul mengembangkan *aquaculture* air tawar yang berpengaruh terhadap pergeseran peran reproduktif perempuan nelayan. Teknik pengumpulan data: *indepth interview*, observasi, FGD, teknik dokumentasi. *Key informan* dipilih secara *purposive* yakni nelayan, perempuan nelayan dan para pengelola kelembagaan lokal pesisir; aparat dari instansi terkait: Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, koperasi dan KUB (Kelompok Usaha Bersama) nelayan dan perempuan nelayan di kabupaten Bantul. *Focus Group Discussion* (FGD) pertama dilakukan dengan 8 (delapan) orang perwakilan dari penerima PUMP, FGD kedua dilakukan bersama 7 (tujuh) penyuluh, FGD ketiga dilaksanakan dengan mengundang 10 (sepuluh) *stake holder* yakni anggota kelompok kerja, kepala seksi DKP dan anggota Satuan Kerja Terkait. Teknik analisis interaktif yang digunakan yakni: reduksi data; sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992). Guna menjamin dan mengembangkan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi data (sumber) dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda: yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan hasil *indepth interview* dengan hasil observasi dan *Focus Group Discussion*. Kerangka analisis gender Model Harvard digunakan dalam melihat: (1) tiga peran gender (*triple roles*) dari kelompok pengolah pemasar ikan (kelompok perempuan nelayan) dan kelompok budidaya ikan

(pokdakan) penerima PUMP. Peran tersebut: peran publik dengan kegiatan produktifnya, peran domestik dengan kegiatan reproduktifnya, peran sosial/kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya serta (2) analisis terhadap akses, kontrol dan faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian:

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa/kelurahan, 933 pedukuhan, dengan jumlah penduduk 868.155 jiwa. Luas wilayah darat Kabupaten Bantul 50.685 Ha atau 506,85 km², wilayah laut Kabupaten Bantul mencapai ±125,936 km². Penduduk yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor pertanian 41,17 persen di sektor peternakan 14,73 persen, dan di sektor perikanan 3,24 persen, sedangkan sebesar 40,86 persen di sektor industri, perdagangan, jasa dan lain-lain. Berdasarkan data per 31 Desember 2015 volume produksi perikanan tangkap yang telah dicapai sebanyak 740,60 ton atau 41,33 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 1.792 ton. Banyaknya nelayan di wilayah Kabupaten Bantul yang beralih menjadi pembudidaya udang vannamei berimbas pada minat melaut berkurang. Kondisi ini turut menggeser pola kerja perempuan nelayan, mengingat tidak semua kegiatan peternakan udang melibatkan perempuan nelayan. (Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015). Kurangnya keterampilan perempuan nelayan mengakibatkan mereka tidak terlibat dalam budidaya udang. Pengusaha tambak acapkali mendatangkan tenaga dari Pangandaran yang lebih dahulu sukses dalam hal budidaya udang. Di samping menjadi peternak, petani dan pembudidaya ikan, nelayan di saat tidak melaut, mencari pekerjaan serabutan seperti tukang, berdagang atau mengelola warung ikan di wilayah pesisir. Jumlah pelaku utama dan usaha perikanan sebanyak 6.058 RTP (Rumah Tangga Perikanan), yang didominasi perikanan tangkap sebanyak 760 RTP, sedangkan

kelompok pengolah dan pemasar ikan 276 RTP dan nelayan 116 RTP.

Periode tahun 2015, capaian kinerja produksi perikanan tangkap masuk dalam kriteria kurang baik, sedangkan untuk produksi perikanan budidaya masuk dalam kriteria cukup baik. Pencapaian produksi perikanan tangkap jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DI.Yogyakarta, Kabupaten Bantul memberikan kontribusi 13,32 persen dari total produksi perikanan tangkap DI.Yogyakarta. Sementara untuk produksi budidaya, Bantul mampu memberikan kontribusi sebesar 16,38 persen dari total produksi perikanan budidaya DI.Yogyakarta.

Profil Informan

Penerima PUMP adalah kelompok pengolah dan pemasar ikan (poklahsar) dan kelompok budidaya ikan (pokdakan). Penerima PUMP tahun 2012 sebanyak 20 kelompok, tahun 2013 hanya lima kelompok, tahun 2014 sebanyak sembilan kelompok yang pada umumnya beranggotakan perempuan nelayan. Penerima PUMP Budidaya pada tahun 2012 terdapat 20 kelompok budidaya lele; tahun 2013 terdapat delapan kelompok budidaya gurami, dan satu kelompok budidaya lele. Rata-rata setiap kelompok beranggotakan delapan hingga tiga belas orang.

Peran Gender

Perempuan nelayan merupakan pelaku utama pada semua kegiatan reproduktif masyarakat pesisir. Beberapa kegiatan reproduktif di dalam rumah tangga masyarakat pesisir antara lain memasak, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, berbelanja dan mengurus anak. Nelayan pun melakukan kegiatan tersebut namun lebih dominan perempuan nelayan yang melakukan. Data empiris menunjukkan adanya pandangan bahwa peran perempuan nelayan dalam kerja domestik telah memberikan citra non produktif pada perempuan nelayan sebagai sebuah stereotipe yang tidak menguntungkan perempuan nelayan.

Sedangkan untuk peran produktif, tidak semua perempuan dalam komunitas pesisir

yang mempunyai peran produktif melakukan aktivitas yang terkait langsung dengan kegiatan kenelayan seperti sebagai penyedia modal nelayan, melakukan penangkapan ikan atau pengumpulan hasil laut, pengolahan dan pemasarannya. Adapula yang mempunyai usaha lain, yaitu membuka warung baik yang masih terkait secara langsung dengan kebutuhan nelayan, seperti menjual BBM (bahan bakar minyak) maupun yang tidak terkait, yaitu warung sembako dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya serta ada pula yang berdagang makanan dan pakaian serta oleh-oleh untuk para wisatawan yang berkunjung di pantai.

Ketika perempuan nelayan mulai banyak bekerja di sektor informal, hal ini memunculkan tiga indikasi. Pertama, adanya keterbatasan akses kaum perempuan untuk masuk ke dalam sektor formal karena adanya keterbatasan pada aspek pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Kedua, kaum perempuan sendiri yang memilih masuk ke sektor informal dengan pertimbangan adanya kemudahan, keleluasaan dan fleksibilitas kerja di sektor informal yang tidak mungkin diperoleh ketika bekerja di sektor formal. Ketiga, diversifikasi usaha merupakan cara perempuan nelayan bertahan hidup ketika terjadi hantaman perubahan iklim dan peminggiran posisinya ketika pekerjaan lain tidak mungkin dilakukannya akibat perubahan sosial yang menyertai.

Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan pesisir, kedudukan perempuan nelayan sebenarnya sangat dominan. Namun keterlibatan perempuan nelayan berangsur berkurang ketika banyak lahan budidaya ikan berubah menjadi tambak udang, yang dibuka baik yang legal maupun illegal di wilayah pesisir Bantul. Terjadinya perubahan teknologi budidaya perikanan menuntut adanya perubahan model produksi. Hal ini makin mempertegas tersingkirnya peran perempuan nelayan dari produksi perikanan. Akibatnya, mereka harus mengubah jenis pekerjaan menjadi tenaga serabutan dengan upah sangat rendah. Ketika perempuan mulai meninggalkan arena domestik dan makin terlibat dalam pasar tenaga kerja, upah yang diterima berbeda dengan nelayan,

dengan alasan tenaga perempuan nelayan secara kualitas maupun secara kuantitas tidak sebesar tenaga nelayan sehingga harus dihargai lebih rendah.

Peran sosial dilakukan oleh anggota kelompok poklamsar maupun pokdakan, artinya baik nelayan maupun perempuan nelayan terlibat dalam kegiatan sosial. Dalam gradasi tertentu, poklamsar yang anggotanya perempuan nelayan jauh lebih aktif dibanding kelompok budi daya ikan (pokdakan) yang anggotanya nelayan. Kesibukan melaut, kerja serabutan lain menjadi faktor penghambat nelayan untuk aktif dalam kegiatan sosial. Melalui berbagai kegiatan kelembagaan lokal, keluarga nelayan mendapatkan berbagai keuntungan dalam menopang ketahanan pangan rumah tangga. Bentuk arisan yang dijalankan berupa arisan uang tingkat RT atau RW yang dikelola oleh pengurus RT dan RW. Selain itu, ada juga arisan gula, arisan beras, hingga perabot rumah tangga yang biasanya diadakan oleh kelompok perempuan nelayan pada saat pengajian dan pertemuan rutin kampung.

Ketiga peran tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap akses dan kontrol perempuan nelayan. Kontrol terhadap uang atau penghasilan isteri pada umumnya sudah dilakukan dengan keputusan bersama. Namun, masih banyak juga yang berpandangan bahwa suami memiliki otoritas keputusan akhir. Kuatnya dominasi suami dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga disebabkan budaya patriarkhi yang masih mengakar dalam keluarga. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga sedangkan isteri harus taat dan tunduk pada keputusan suami. Pengambilan keputusan yang didominasi oleh suami, mengakibatkan terbatasnya aksesibilitas isteri terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga. Terbatasnya aksesibilitas isteri terhadap pendapatan dapat dicontohkan dengan penolakan suami terhadap keinginan isteri untuk membelikan perabot rumah tangga. Meskipun uang yang hendak dibelanjakan merupakan hasil pendapatan isteri, namun karena suami tidak setuju, isteri hanya bisa taat dan patuh pada keputusan suami. Perempuan

nelayan yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah keluarga tetap memiliki keterbatasan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi yang dihasilkannya. Sementara nelayan sebagai kepala keluarga lebih dominan dan berkuasa meskipun tidak memberikan nafkah secara nyata (pekerja serabutan) dan rutin kepada keluarga. Adanya konsep kodrat yang secara sosial dan budaya mengharuskan perempuan nelayan berkerja lebih keras untuk membantu menopang kehidupan rumah tangga atau keluarganya, menyebabkan perempuan harus menerima keadaan sebagai warga negara kelas dua dalam masyarakat.

Akses dan Kontrol Perempuan Nelayan terhadap PUMP

Kebijakan BLM-PUMP diluncurkan bagi masyarakat pesisir sebagai perangsang tumbuhnya aset produktif sebagai insentif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi pesisir. Program ini memberikan akses berupa dana pembelian alat sarana prasarana usaha disertai penguatan kelembagaan ekonomi. Data empiris menunjukkan akses dan kontrol yang diterima perempuan nelayan terhadap sumberdaya perikanan masih rendah. Belum semua perencanaan dan pengambilan kebijakan menganggap isu gender adalah masalah prioritas. Hal ini tercermin di antaranya, kurangnya identifikasi kebutuhan perempuan di kawasan pesisir akibat keterbatasan pemahaman dan penyuluh terhadap pendampingan perempuan nelayan dan nelayan dalam aktifitas penangkapan dan pengolahan hasil perikanan.

Serangkaian tahapan program, mulai dari sosialisasi, perencanaan, perekrutan tersebut dinodai oleh kepentingan-kepentingan politis Tim Pokja (Kelompok Kerja). Pokja adalah Tim Pelaksana PUMP-PB di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUMP-PB di tingkat Direktorat Jenderal. Calon penerima PUMP lebih banyak ditentukan oleh Tim Pokja yang terdiri dari pejabat-pejabat partai bekerjasama dengan Tim Pembina yakni Tim Pelaksana PUMP-PB

di tingkat Provinsi. Sisanya baru diberikan pada calon penerima yang diusulkan oleh penyuluh setempat. Bila mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUMP, proses yang seharusnya dilewati meliputi: a) Identifikasi CL (calon lokasi)/ CP (calon penerima) oleh tenaga pendamping untuk kemudian dilakukan seleksi dan verifikasi, selanjutnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selaku penanggung jawab program melalui Keputusan Direktur Jenderal.b). Verifikasi RUK/RUB PUMP-PB dari tenaga pendamping dan tim teknis sebagai dasar pengusulan calon pokdakan penerima BLM PUMP-PB. c). Hasil verifikasi diusulkan oleh Tim Teknis kepada Tim Pembina Dinas KP Provinsi melalui surat Kepala Dinas Kabupaten/ Kota untuk diteruskan kepada Kelompok Kerja (Pokja). d). Pokja memverifikasi ulang semua dokumen pokdakan untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal sebelum kegiatan pencairan dan pemanfaatan BLM PUMP-PB. Dampak dari perekrutan yang tidak sesuai prosedur ini adalah mengoyak kepercayaan kelompok pedagang dan budi daya ikan kepada penyuluh. Rekomendasi penyuluh tidak diperhatikan sepenuhnya oleh Tim Pokja. Bahkan perguliran PUMP tersebut dikenal dengan istilah “dana aspirasi”. Ini berarti, penentuan sasaran penerima tidak berdasar pada *needs assessment* masyarakat pesisir.

Proses sosialisasi adanya PUMP dilakukan tidak sepenuhnya terbuka. Peneliti mengkonfirmasi kepada tim teknis penyeleksi yang berwenang, tidak membantah kurangnya sosialisasi tersebut. Untuk pelaksanaan kegiatan PUMP yang pertama tahun 2013 bahkan cenderung tidak terbuka karena dikhawatirkan akan menyulitkan tugas tim penyeleksi bila diinformasikan kepada pokdakan di wilayah pesisir Bantul: “proses rekrutmen calon penerima ini lebih ditekankan pada aspirasi DPR, dana aspirasi gitulah, sudah bulan rahasia lagi”. (wawancara dengan penyuluh N, Juli 2015) “pihak Dinas DKP di awal sudah menyeleksi namun tim pokja DPR sudah punya daftar lebih dulu. Misalnya partai A dapat sekian, partai B dapat sekian tergantung hasil rapatnya tim.

Jadi kami dapat sisanya”. (Wawancara dengan informan P, Juli, 2015).

Dalam segi akses terhadap dana, di tahun pertama penerapan ini di desa pesisir Kabupaten Bantul, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ketua kelompok penerima BLM PUMP merupakan kelompok elit di wilayah pesisir. Kelompok mayoritas pesisir, yang memiliki sedikit aset atau pendapatan rendah, nelayan kecil atau kelompok pedagang ikan dengan modal pas-pasan tidak tersentuh oleh program ini. Kelompok miskin dan rentan tersebut tidak terbiasa bertindak kolektif sehingga sangat perlu dipikirkan cara menciptakan dan menjaga kesempatan agar kepentingan mereka dapat diartikulasikan ke tingkatan yang lebih tinggi. Menciptakan kesempatan tersebut memang bukan pekerjaan mudah terutama setelah disadari bahwa tanpa adanya upaya sistematis dalam bentuk intervensi, kelompok miskin akan tetap sulit untuk terlibat di dalam proses pengaturan sumber daya. Secara struktural, kelompok miskin memiliki posisi tawar yang lemah terhadap anggota masyarakat lainnya yang memiliki kekuasaan lebih besar dan juga berkepentingan atas pengaturan sumber daya yang sama.

Akses nelayan terhadap pinjaman PUMP jauh lebih banyak dibanding perempuan nelayan mengingat nelayan lebih banyak diundang pada berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan. Frekwensi bertemu penyuluh, kedekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penentu terpilih tidaknya sebagai penerima PUMP. Hal ini berbeda dengan perempuan nelayan yang lebih banyak bekerja di sektor domestik dan jauh dari akses informasi. Dalam akses bantuan PUMP, perempuan nelayan lebih banyak berkonsultasi dengan suaminya sebelum mengambil keputusan. Demikian pula ketika ia akan menggunakan bantuan tersebut. Berbeda saat nelayan menerima bantuan PUMP, dalam wawancara mendalam, tidak semua penerima mendiskusikannya dengan istri masing-masing.

Terdapat perbedaan kontrol terhadap sumber informasi antara nelayan dan perempuan nelayan. Mengingat nelayan lebih

sering datang pada berbagai penyuluhan maka kontrolnya terhadap sumberdaya informasi lebih besar. Terutama informasi tentang harga bibit, pakan, obat-obatan dan komoditas hasil produksi pasca panen dan sarana produksi. Perempuan nelayan hampir tidak memiliki kontrol terhadap kapal, perahu, kecuali kolam atau lahan untuk perikanan. Akses perempuan nelayan pada peralatan budidaya juga tidak ada. Dari berbagai kegiatan, akses perempuan nelayan terhadap penyiapan lahan budidaya tidak ada karena dianggap kegiatan ini lebih banyak melibatkan pekerja laki-laki atau pekerjaan berat. Akses perempuan nelayan terhadap pengendalian hama penyakit ikan tidak ada karena perempuan nelayan dianggap kurang memahami dan hanya nelayan yang dianggap memahami karena sering menghadiri penyuluhan. Mengingat perempuan nelayan dipandang kurang memahami dalam kegiatan pengendalian hama penyakit ikan maka mereka tidak memiliki kontrol dalam kegiatan ini.

PUMP hanya terfokus pada akses perempuan terhadap sumberdaya tertentu dan peningkatan kapasitas perempuan terhadap keterampilan tertentu yang biasanya dihususkan bagi perempuan yakni keterampilan yang berhubungan dengan peran perempuan dalam keluarga atau peran domestik. Dengan maksud supaya perempuan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam bidang pengasuhan keluarga, bukan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi perempuan sebagai individu yang mandiri dan dapat membuat keputusan yang mengubah relasi kekuasaan yang timpang baik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat sekitar.

Partisipasi Masyarakat Pesisir terhadap PUMP

Rendahnya akses dan kontrol perempuan nelayan berdampak pada partisipasinya terhadap PUMP. Keterwakilan perempuan nelayan dalam rapat sosialisasi hanya sekedar pemenuhan kuota yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam forum rapat. Dari sisi kualitas partisipasi, suara perempuan

nelayan jarang dijadikan bahan pertimbangan sebagai masukan untuk kepentingan perempuan ketika pelaksanaan program. Selain kurangnya pelibatan perempuan dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi program, bahasa yang digunakan pun, bahasa yang sangat sulit dimengerti oleh peserta rapat.

Sebagaimana kajian sebelumnya (Sahudiyono, 2009; Anggraini, 2008), penelitian ini juga menemukan partisipasi perempuan nelayan pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul cukup aktif, ditunjukkan dengan tingkat kehadiran dan output dari pelatihan. Materi pelatihan berupa pelatihan pengolahan *fish jelly* yang menunjang usahanya menjadi daya tarik tersendiri. Berbeda dengan kelompok budi daya dan pedagang ikan, tingkat kehadiran mereka dan output pelatihan cenderung tidak optimal. Kondisi ini disebabkan nelayan memiliki banyaknya pekerjaan, motivasi kurang tinggi dan menganggap bahwa budidaya ikan adalah pekerjaan sampingan.

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa perempuan nelayan dan nelayan belum memahami benar tujuan dari PUMP. Kekurangmampuan memahami masalah-masalah program ini menyebabkan komunikasi dan interaksi mereka untuk berpartisipasi hingga menjaga kesinambungan program belum optimal. Beberapa di antara penerima PUMP menganggap bahwa dana PUMP sebagai *charity program* tanpa pengawasan dari penyuluh.

Di samping program tersebut diberikan secara *top down* maka sedikit ruang dialog bagi penerima untuk mendiskusikan kebutuhannya. Tertib administrasi persyaratan program nampaknya jauh lebih diutamakan bagi pemrakarsa daripada kebutuhan dari masyarakat pesisir penerima PUMP. Perempuan nelayan cenderung memiliki akses namun minim kontrol pada pendanaan yang digulirkan PUMP. Dana bantuan dipandang sebagai aset keluarga dan kepala keluarga atau suamilah yang menentukan segala kebijakan yang terkait dengan aset tersebut. Pada kelompok budidaya gurami, tidak sedikit peran istri dan anak perempuan mereka membantu merawat, memberikan pakan dan menjual akan tetapi

mereka tidak dilibatkan dalam pelatihan. Ketika hal ini dikonfirmasi peneliti, anggaran pelatihan yang terbatas menjadi kendala bagi pelibatan perempuan nelayan dan anggota keluarga dalam pelatihan.

Manfaat PUMP

Pendanaan PUMP bersumber dari Dana APBN melalui Kementerian dan Kelautan. Bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- per kelompok, diberikan kepada pokdakan sesuai proposal pengajuannya. Perguliran dana, diikuti pelatihan kewirausahaan dan teknis ternak lele dan gurami bermedia terpal yang wajib diikuti. Dari pelatihan tersebut penerima merasakan manfaat teknis meski sederhana seputar: penyiapan wadah, penetasan telur, perawatan larva, sortasi benih, pemberian pakan, sanitasi lingkungan, manajemen air, pemanenan. Awal pelatihan anggota kelompok budi daya ikan tertarik. Namun karena kurangnya monitoring, petani kurang termotivasi, usaha yang dikembangkan merugi, bahkan sebagian besar terpal dan lele dijual. Hal ini bisa dimengerti karena kelompok pemula ini bentukan elit tertentu yang menginginkan bantuan PUMP. Motivasi mereka rendah. Sedangkan kelompok budidaya hasil seleksi penyuluh, berkembang cukup baik dengan penghasilan yang meningkat. Semula sebelum mendapat bantuan, penghasilan masing-masing sekitar 500-750 ribu per bulan, setelah mendapat PUMP meningkat menjadi 600 ribu hingga 1 juta rupiah.

Berbeda dengan kelompok pengolah dan pemasar ikan, dana PUMP bersumber dari Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal P2HP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI senilai Rp. 50.000.000,-. Yang dibelanjakan untuk pembelian alat-alat produksi pascapanen. Data FGD menunjukkan bahwa tidak seluruhnya dana PUMP dibelikan peralatan, sebagian untuk modal usaha karena sebetulnya kelompok perempuan nelayan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Meski tidak sebanyak yang diterima nelayan, perguliran dana PUMP dirasakan cukup bermanfaat bagi kelompok pengolah pemasar ikan. Di samping pemberian alat, penerima diwajibkan mengikuti

pelatihan meliputi kewirausahaan, keuangan sederhana dan pengolahan pasca panen.

Kemampuan berjejaring dua kelompok besar tersebut meningkat, terutama pada kelompok pengolah dan pemasar ikan kategori lanjutan yang sebagian besar perempuan nelayan anggotanya. Sikap mudah bergaul, senang bersosialisasi dan kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mendorong kelompok pemasar ikan menambah dan memperluas jaringan usaha. Berbeda dengan kelompok budidaya ikan yang sebagian besar anggotanya nelayan, karena usaha yang digeluti sambil maka upaya untuk membentangkan jaringan usaha tidak sepesat yang dilakukan perempuan nelayan.

Terungkap juga bahwa distribusi PUMP tidak tepat sasaran, ditandai adanya duplikasi nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan penerima di tahun sebelumnya. Trik seperti ini dilakukan mengingat dalam petunjuk teknis PUMP, dicantumkan bahwa setiap maupun anggota kelompok pedagang ikan tidak boleh di tahun yang sama maupun tahun sebelumnya menerima lebih dari 1 (satu) paket BLM PNPM Mandiri KP dan diutamakan kelompok pedagang ikan yang belum menerima bantuan dari Ditjen Perikanan Budidaya.

Terpinggirkannya pokdakan potensial yang tidak menerima dana PUMP memunculkan resistensi di tengah masyarakat pesisir. Respons atas keadaan seperti itu, meskipun dalam bentuk tidak vulgar berupa protes, mengeruhkan suasana masyarakat pesisir yang semula tenang, geyup dan penuh rasa gotong royong, saling bahu membahu. Sikap resistensi itu diwujudkan dengan keengganan kelompok pedagang dan budi daya ikan dan kelompok pengolah dan pemasar ikan menghadiri beberapa undangan pertemuan, pelatihan yang diadakan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Bantul. Berbagai alasan mereka ungkapkan seperti sibuk melaut, ada keperluan keluarga, waktu yang tidak tepat dan lain-lain. Mereka diam tapi sebetulnya mereka sedang protes karena tidak menerima dana PUMP. Tidak hanya kelompok pedagang dan budidaya ikan dan kelompok pengolah dan pemasar ikan

yang resah akibat ketidaknyamanan situasi seperti ini, sejumlah tokoh masyarakat yang merasa tidak diikutsertakan berembung, harus turun tangan untuk mendinginkan suasana.

Dari proses pembentukan jaringan, telah dirintis kemitraan antara kelompok pengolah dan pemasar ikan dan kelompok budidaya. Dengan demikian, dengan adanya PUMP dapat menjadi jembatan kepentingan dua kelompok. Hal ini menegaskan pendapat Smajgl dan Larson (2006) bahwa kelembagaan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sepanjang adanya perluasan usaha dan ada kebebasan memperoleh peluang ekonomi. Kesulitan pemasaran poklaksar dan pokdakan untuk mencari bahan baku, sebagian dapat diatasi oleh kelompok pedagang dan budidaya ikan. Pemkab Bantul juga memfasilitasi pemasaran produksi ikan melalui berbagai kancah pameran dan mendampingi pertemuan Kelompok "Projo Mino" (paguyuban pokdakan dan poklaksar di Bantul). Melalui berbagai upaya tersebut, jaringan pohlaksar dan pokdakan diperluas. Meskipun belum terbentuk solid, setidaknya pemberdayaan kedua kelompok tersebut tidak berhenti namun berkelanjutan. Nee (2005) menegaskan tentang proses interaksi lembaga dengan norma-norma sosial dapat menggerakkan kepentingan ekonomi individu maupun kelompok. Berangkat dari kerukunan yang telah terjalin sebelumnya dan adanya kepentingan yang sama dalam memajukan kesejahteraan anggota (Ostrom, 1990), masing-masing kelompok berusaha keras untuk menunjukkan performance kinerja kelompok dengan sebaik-baiknya karena dipandang menguntungkan. Sebagaimana konsep pertukaran sosial Blau, pertukaran sosial pada masyarakat nelayan ini didasarkan pada *reward instrinsik* dan *reward ekstrinsik*. Pertimbangan dalam bertindak laku ini didasarkan pada sistem nilai individu dan nilai lingkungan sosial, yang bila menguntungkan, akan diulang (Blau: 1964)

Di sisi lain, bersumber dari Laporan Tahunan DKP Kabupaten Bantul 2012 dan 2013, FGD dan interview mendalam, pelaksanaan PUMP meninggalkan sederet persoalan:

pertama, belum terbentuknya kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar ikan yang solid sehingga belum mampu menghasilkan produk olahan ikan yang berkualitas baik sesuai selera pasar serta belum terbentuk jaringan pasar yang mampu menyerap hasil-hasil produksi sesuai target. Kedua, bahan baku ikan masih diperoleh dari luar daerah sehingga menambah beban biaya produksi, yang gilirannya berpengaruh terhadap persaingan harga. Ketiga, keterbatasan pemanfaatan teknologi pengolahan dan penanganan ikan belum menggunakan sistem rantai dingin sehingga produk yang dihasilkan relatif menurun kualitasnya. Keempat, perguliran dana PUMP semestinya dibersamai dengan pelatihan dan pendampingan intensif. Pada tahun 2013, karena minimnya anggaran, penerima PUMP hanya lima kelompok. Dana pelatihan yang direncanakan Rp. 45.000.000,- dan dana pendampingan Rp. 15.000.000,- tidak terealisasi. Akibatnya, output program tidak dikawal dengan baik. Terakhir, perempuan nelayan memiliki ketidakberdayaan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan melalui pengembangan ekonomi karena marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi. Pelatihan PUMP berupa peningkatan aneka keterampilan, masih bersifat praktis dan merupakan kepanjangan dari peran domestik. Dengan demikian, belum sepenuhnya meningkatkan dan mengembangkan potensi perempuan sebagai individu yang mandiri, yang dapat mengubah ketimpangan relasi kekuasaan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat.

Pemberdayaan melalui program PUMP meski dijiwai dengan semangat pengarusutamaan gender pada implementasinya masih bias gender. Pemberdayaan seharusnya merupakan proses merubah relasi kekuasaan yang berarti, perempuan mempunyai kontrol atas sumber daya (Kabeer, 2005, 2004; Mosser, 1993). Dalam pemberdayaan, pengalokasian kekuasaan melalui perubahan struktur sosial itu penting karena pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang yang lemah, termasuk perempuan (Ife, 2008: 316).

D. SIMPULAN

Lemahnya data terpilah gender dan sistem pemantauan, indikator pencapaian yang kurang berdasar pada *needs assessment* perempuan nelayan secara riil dan tidak adanya afirmasi pemerintah mengakibatkan akses, kontrol dan partisipasi perempuan nelayan rendah terhadap PUMP. Selain itu, program masih meminggirkan kelompok marginal di pesisir. Walaupun demikian, partisipasi poklhasr dan pokdakan yang semula bersifat simbolis dapat dikembangkan dengan pendampingan penyuluh khususnya pada kelompok yang berkategori lanjutan untuk menjadi kelompok mandiri. Optimalisasi program yang hanya diukur secara administratif hanya akan berakibat pada tidak berubahnya posisi dan kedudukan perempuan nelayan, yang sampai saat ini masih rentan menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dan termarginalisasi. Jejaring kelompok perempuan nelayan pelaku usaha serta pengusaha lokal hendaknya dimantapkan melalui pembentukan kelompok usaha bersama yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menghasilkan komoditi yang sesuai dengan selera pasar. Sedangkan jejaring antara kelompok usaha dengan pengusaha lokal dimaksudkan untuk mendekatkan, memperluas pasar dan memperkuat modal. Penguatan jaringan ini juga bermanfaat nantinya bagi standarisasi harga dan mutu produk. Penambahan kapasitas diri dan lembaga yang dikelola oleh perempuan merupakan investasi pembangunan bagi pengelolaan pesisir yang optimal dan berkelanjutan.

Diucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi dana penelitian melalui program penelitian Disertasi Doktor tahun 2016 sehingga penelitian tentang "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Menanggulangi Kemiskinan Struktural Perspektif Gender di Kabupaten Bantul" ini, dapat terselenggara dengan baik.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

PUSTAKA ACUAN

- Anggraini, Oktiva. 2008. Modal Sosial dalam Pengembangan *Ecotourism (Ekowisata)* di Wilayah Pesisir (*Laporan Penelitian Hibah Bersaing*).
- , Oktiva. 2014. Integrasi Gender dalam Penguatan Modal Sosial Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bantul (*Laporan Penelitian Hibah Bersaing*).
- Bennet, E. 2005. Gender, fisheries and development. *Marine Policy*. 29: 451–459.
- Blau, Peter. M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley & Sons., 1964.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. (Sastrawan Manulang, Nurul Yakin, & M.Nursyahid, penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kabeer, Naila. 2005. Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the Third millenium development goals. *Gender and Development* Vol.13. No.3. Maret.
- Kabeer, Naila. 1994. *Reversed realitis: Gender Hierarchies in Development Thought*. London-New York: Verso.
- Larson, Smajgl. A. 2006. Institutional Dynamics and Natural Resource Management. In. A.Smajgl and S. Larson. (Eds). *Adapting Rules for Sustainable Resource Use*. pp.9-26. CSIRO Sustainable Ecosystems. Townsville. 153.
- Hancock, Peter. 2001. "Gender empowerment issues from West Java, in Susan Blackburn (ed), *Love, sex, and power: Women in Southeast Asia* (h.75-88). Australia: Monash Asia Institute-Monash University Press.
- Lister, Ruth. Gender and the Analysis of Social Policy, In Lewis, Gail, Gewiitz, Sharon and Clarke, John. 2000. *Rethinking Social Policy*. Sage Publications, London.
- Miles, B.B. A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press Jakarta.
- Moser. CON. 1993. *Gender Planning and Development, Theory, Practise and Training*. Roudledge.
- Nee, Victor. 2005. "The New Institutionalisms in Economics and Sociology," in Smelser J. Neil and Richard Swedberg (eds), in *the Handbook of Economic Sociology*. Princeton University Press.
- Ostrom, E. 1990. *Governing The Commons: The*

Evaluation of Institutions for Collective Action.

Cambridge University Press. New York.

Partosuwirjo, Mulyono. 2010. Kajian Interaksi Lingkungan Usaha Perikanan untuk Menyusun Model Pemberdayaan Usaha Perikanan Tangkap di DIY. *Disertasi* Bogor. IPB.

Sakaria, 2014. Kapital Sosial, Negara dan Pasar: Studi pada Komunitas Pulau-pulau Kecil (Kasus Komunitas Nelayan di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar-Provinsi Sulawesi Selatan). *Disertasi*. Bogor: IPB.

Sahudiyono, 2009. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul. *Tesis*. UGM.

Weeratunge, N., K.A. Snyder, and C.P. Sze. 2010. Gleaner, fisher, trader, processor: Understanding gendered employment in fisheries and aquaculture. *Fish and Fisheries* 11: 405–420.

Jurnal Berkala:

FAO, 2012. *Selected Issues in Fisheries and Aquaculture*. National Aquaculture Sector Overview. NASO Facts Sheet.

Laporan Tahunan DKP Kabupaten Bantul 2012.

Laporan Tahunan DKP Kabupaten Bantul 2013.